



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510
Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513
Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004

LK j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025



Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 89, Kec Tanjung, Kode Pos
71513, Telp / Faks : (0526) 2021073, Email:
kesbangpol.tabalong@gmail.com
Website: www.kesbangpol.tabalongkab.go.id/

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada suatu perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, yaitu :

1. Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Warga Negara
2. Meningkatkan Rasa Nasionalisme di Masyarakat dan Warga Negara
3. Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik Sosial
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dana Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 24.897.441.817,00 (Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.778.506.945,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian belanja :

1. Belanja Operasi sebesar 24.897.441.817,00 terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar 5.293.990.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 4.311.781.970,00
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar 8.222.811.817,00 dengan realisasi anggaran sebesar 6.086.084.975,00
 - Belanja Hibah sebesar 11.380.640.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 11.380.640.000,00
2. Belanja Modal sebesar 778.956.741,00 terdiri dari :

- Belanja Modal sebesar 778.956.741,00 dengan realisasi anggaran sebesar 634.648.130,00

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dan 12 (Dua belas) kegiatan dengan perubahan dana sebesar Rp.25.676.398.558,00,- (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Hingga akhir Desember 2025 Capaian Realisasi Keuangan Belanja Program dan Kegiatan sebesar Rp. 18.101.373.105,00,- (Delapan Belas Milyar Seratus Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Rupiah) atau 88,80%. Sedangkan Capaian Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 4.311.781.970,00,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 81,45%.

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan pencapaian kinerja aktual tahun 2024 dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, diperoleh bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam pencapaian sasaran strategis adalah 87,29%.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 antara lain adalah:

1. Jumlah peserta sosialisasi masih terbatas dan peserta selama ini hanya para pelajar SLTA/ sederajat, belum mencakup elemen masyarakat dan hanya dilakukan di Kabupaten/kota.
2. Kurangnya SDM yang ada dikepengurusan parpol dalam pembuatan SPJ terutama dalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, adanya pergantian kepengurusan dalam parpol, masih kurangnya jumlah bimtek yang dilakukan kepada parpol, terlambatnya laporan camat kepada badan Kesbangpol, kurangnya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan, sehingga tidak semua elemen masyarakat dapat mengikutinya, kurangnya jumlah dana yang tersedia.
3. Masih kurangnya jumlah pertemuan dengan SKPD yang dilakukan 1 tahun, kemampuan SDM anggota LSM masih cukup rendah, masih kurangnya pembinaan terhadap ormas khususnya LSM, sulitnya melakukan pendataan keberadaan ormas untuk dijadikan data yang valid.
4. Kurangnya sosialisasi dan monitoring ke lapangan.

5. Tim dan forum-forum daerah yang di daerah menangani deteksi dini dan penanganan konflik belum bekerja maksimal. Pada kegiatan penanganan orang asing masih adanya data yang tidak sinkron antar instansi terkait.

Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah kitapanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini maka terlihat gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis selama kurun waktu Tahun 2025 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tanjung, 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,



Drs. ARBUANSYAH, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19730207 199311 1 003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	4
1.3 Isu Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
2.2 Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2025	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	13
3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	18
3.4 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Strategis	20
3.5 Kendalan dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	22
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025	24
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	
- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala SKPD tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	3
------------	--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.....	8
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	11
Tabel 3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	12
Tabel 3.1.2	Pencapaian Indikator Sasaran.....	13
Tabel 3.2.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I.....	13
Tabel 3.2.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II.....	15
Tabel 3.2.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III.....	17
Tabel 3.2.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV.....	18
Tabel 3.3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.....	18
Tabel 3.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan target Jangka Menengah (Tahun 2025) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.....	19
Tabel 3.6.1	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2025.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Letak Geografis Kabupaten Tabalong yang sangat strategis di antara dua Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, serta semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Tabalong, menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kota yang berkembang dengan cepat. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya dapat memacu hal-hal yang bersifat positif namun dapat memacu akan timbulnya berbagai gejala politik sosial, ekonomi, budaya dan agama serta Kamtibmas yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, maka pembangunan Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban Umum merupakan salah satu program yang mutlak harus dilaksanakan, karena Kondisi Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban suatu wilayah sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Roda pemerintahan tak akan berjalan dengan lancar bila tidak didukung dengan situasi Politik dan Kamtibmas yang mantap dan terkendali.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yaitu : **“Menuju Tabalong Smart (Sejahtera, Maju, Religius Dan Terdepan)”** maka persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Tabalong harus tetap di jaga. Persatuan dan Kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Selain Persatuan dan Kesatuan ada hal yang lebih penting lagi guna mewujudkan visi Kabupaten Tabalong yaitu kehidupan yang demokratis, dinamis dan aman. Apabila masyarakat Kabupaten Tabalong hidup secara demokratis, dinamis dalam segala hal serta dapat menjaga keamanan maka diharapkan visi Kabupaten Tabalong dapat terwujud.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

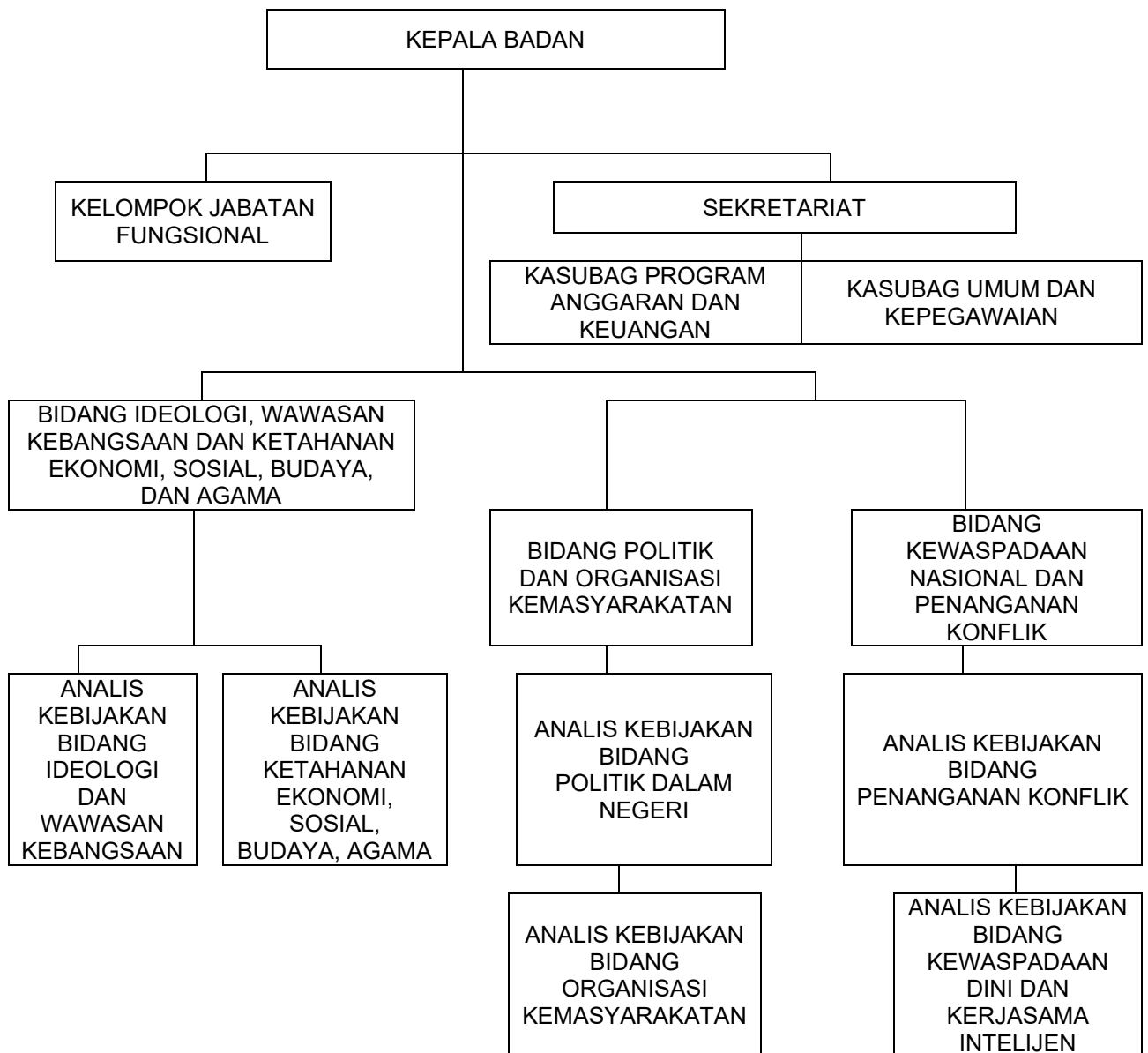
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong. Selanjutnya pelaksanaan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu ***“Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lainnya “***.

Sedangkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik..
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ideologi, Wawasa dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong mempunyai Tugas Pokok “Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lainnya”.

Dalam dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, khususnya sebagai akibat arus globalisasi yang demikian deras, akan mempengaruhi kehidupan Kedudukan sosial, ekonomi, dan budaya dan Agama masyarakat Kabupaten Tabalong. Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan kondusifitas daerah; dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham serta kelompok radikalisme yang mengarah kepada perpecahan atau Disintegrasi Bangsa. Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat.

Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah, Legeslatif secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik bagi masyarakat dan kesiapan partai politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualisasi Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite- elite-nya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan

upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi atau Pendidikan Politik secara berkesinambungan dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban di masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam berpolitik.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tabalong dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya LKJiP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustry terdiri dari :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah timur dengan wilayah tenggara Daerah
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah
3. Peningkatan perlindungan kawasan lindung
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
7. Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dari kebijakan penataan ruang wilayah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat memberikan pelayanan berupa perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional terutamapengawasan

terhadap Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini yg harus segera sdcar penyelesaian. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro, isu –isu yang berkembang dimasyarakat harus didukung oleh data – data yang akurat/valid, sehingga bukan isi yang tanpa dasar. Kokohnya Kesatuan dan Persatuan meupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Selain kemajemukan masyarakat Kabupaten Tabalong berpotensi terhadap kerawanan social, politik dan wilayah yang dapat mengarah pada timbulnya konflik. Dengan demikian, Isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Keragaman kondisi ekonomi, sosial dan budaya, agama di masyarakat Kabupaten Tabalong yang bisa memicu adanya konflik.
2. Ancaman disintegrasi bangsa di masyarakat.
3. Tingginya Ancaman Terorisme, Narkoba, Gangguan Kamtibmas, dan permasalahan sosial lainnya.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Jadi dapat disimpulkan Isu Stategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah “Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan serta stabilitas keamanan dan politik daerah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem keamanan serta politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ditetapkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Perwujudan tersebut hanya dapat terjadi dengan pencapaian target kinerja tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Di dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah ditetapkan target indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Warga Negara	Persentase pembinaan pendidikan berpolitik di daerah	70%
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	70%
2	Meningkatnya Rasa Nasionalisme di Masyarakat dan Warga Negara	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ekonomi, sosial budaya, agama	70%
3	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	Persentase pembinaan kewaspadaan nasional	75%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

NO	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.878.730.232	8.451.116.212
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.515.632.918	2.087.202.300
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.072.982.568	1.721.680.430
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.193.842.000	1.287.273.570
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	570.568.420	672.482.534
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	984.039.000	11.456.643.512
	Jumlah	Rp. 14.215.795.138	Rp. 25.676.398.558

2.2 Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong telah menyusun program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Program, kegiatan, dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Adapun program, kegiatan, dan anggaran untuk setiap kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dan anggaran setiap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.878.730.232	8.451.116.212
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.515.632.918	2.087.202.300
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.072.982.568	1.721.680.430
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.193.842.000	1.287.273.570
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	570.568.420	672.482.534
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	984.039.000	11.456.643.512
	Jumlah	Rp. 14.215.795.138	Rp. 25.676.398.558

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kabupaten Tabalong selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Tabalong pada setiap sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja maka digunakan skala pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA NILAI PERANGKAT KINERJA

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;

Tujuan 2, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;

Tujuan 3, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator,

3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2025, telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.1.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian s/d tahun 2029 (%)	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	Persen	-	70	70	100	83	83	Sangat tinggi
2.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	-	70	70	100	80	80	Sangat tinggi

3.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan EKOSOSBUD	Persen	-	70	75	100	87	87	Sangat tinggi
4.	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	Persen	-	75	75	100	87	87	Sangat tinggi
5.	Predikat Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A	Sangat tinggi

Tabel 3.1.2
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No	Interpretasi	Jumlah Sasaran
1.	Sangat Tinggi	5
2.	Tinggi	-
3.	Sedang	-
4.	Rendah	-
5.	Sangat Rendah	-
6.	Data Belum Rilis	-
Jumlah		5

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Warga Negara

Tingkat pencapaian sasaran strategis I di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu: Dengan tingginya pembinaan pendidikan politik dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten tabalong semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi.

Indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.2.1 berikut.

Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		

1.	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	Persen	-	70%	70%	100%	83%	100%
2.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	-	70%	70%	100%	83%	100%



Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis I ini menunjukkan pencapaian 70%. Namun di tahun 2024 realisasi 0 dikarenakan ini adalah indikator baru. Pencapaian di tahun ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan terkait dengan sasaran strategis I ini juga telah cukup efektif untuk mencapai indikator kinerja yang ditargetkan. Kegiatan tersebut khususnya adalah Program Pendidikan politik. Untuk mendukung sasaran yang kedua ini juga telah dilakukan kegiatan Penyuluhan kepada masyarakat. Pada tahapan pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan ini telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Kegiatan sosialisasi dan desiminasi terhadap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tabalong, khususnya dalam rangka pencerahan hak-hak politik masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tabalong agar menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan bahwa kesadaran dan pendidikan politik yang baik berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, Pemilukada.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kewaspadaan Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial

Tingkat pencapaian sasaran strategis II di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu: Dengan meningkatnya kewaspadaan dini / deteksi dini terhadap ancaman, tantangan,hambatan, gangguan serta pertemuan forum oleh semua unsur komponen di daerah maka akan mengantisipasi terjadinya potensi konflik di Kabupaten Tabalong.

Indikator Tingkat keberhasilan dengan meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, proses pembangunan di Kabupaten Tabalong dapan berjalan dengan kondusif. pencapaian kasus yang berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan diukur dengan membandingkan jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antar golongan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 dengan tahun 2025. Diartikan bahwa meningkatkan kewaspadaan dini / deteksi dini terhadap ancaman, tantangan,hambatan, gangguan serta pertemuan forum oleh semua unsur komponen di daerah maka akan mengantisipasi terjadinya potensi konflik di Kabupaten Tabalong

Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.2 berikut.

Tabel 3.2.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	Persen	-	75%	75%	100%	87%	100%



Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang kedua ini menunjukkan pencapaian Pencapaian ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kejadian berlatar belakang suku, ras, dan antara golongan di Kabupaten Tabalong. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait sasaran strategis II ini telah cukup efektif untuk mencapai indikator kinerja yang ditargetkan. Pada tahun 2025 kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis II ini yakni meningkatkan kewaspadaan dini / deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta pertemuan forum oleh semua unsur komponen di daerah maka akan mengantisipasi terjadinya potensi konflik di Kabupaten Tabalong. Kegiatan lainnya adalah Deteksi Dini potensi Konflik, Penguatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing di daerah. Namun pada tahun 2024 Realisasi 0 dikarenakan indikator tersebut masih baru.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Rasa Nasionalisme di Masyarakat dan Warga Negara

Tingkat pencapaian sasaran strategis III di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu : Dengan meningkatnya intensitas pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat/pelajar tentang sosial budaya dan nilai-nilai bangsa, akan meningkatnya rasa nasionalisme dan ketahanan ekonomi sosial budaya di Kabupaten Tabalong.

Indikator tingkat keberhasilan dengan meningkatnya intensitas pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat/pelajar tentang sosial budaya dan nilai-nilai bangsa. Diharapkan dengan tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut semakin meningkatnya rasa nasionalisme dan ketahanan ekonomi sosial budaya di Kabupaten Tabalong.

Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.2.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial	Persen	-	70%	70%	100%	80%	100%



Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang ketiga ini dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI serta terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah Kab. Tabalong maka Badan Kesbangpol melaksanakan pertemuan antara Bupati Tabalong bersama forum-forum FKDM, FPK , FKUB, terdiri dari tokoh agama, masyarakat, media, adat, unsur pemangku agama, unsur elemen masyarakat serta paguyuban yang ada di Kabupaten Tabalong. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait sasaran strategis II ini telah cukup efektif untuk mencapai indikator kinerja yang ditargetkan. Namun pada tahun 2024 Realisasi 0 dikarenakan indikator tersebut masih baru.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tingkat pencapaian sasaran strategis IV di atas diukur dengan indikator kinerja, yaitu: Nilai AKIP SKPD dan Kabupaten yang semakin baik.

Indikator Tingkat keberhasilan dengan naiknya Nilai AKIP bahwa menunjukkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) semakin tahun semakin baik.

Gambaran pencapaian indikator kinerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1.3 berikut.

Tabel 3.2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah Budaya	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	BB

3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2025

Salah satu cara untuk mengevaluasi peningkatan kinerja adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu antara capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2025. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun 2025, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2025, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.1 berikut.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	-	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	100%
2	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya	-	100%

3	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	-	100%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	-

Selain membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2025, juga dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.2 Perbandingan ini perlu dilakukan untuk melihat potensi pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dengan mengacu pada pencapaian indikator kinerja tahun 2025.

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Target Jangka Menengah (Tahun
2025)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)
1	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	70%	83%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	70%	83%
2	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya	70%	80%
3	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	75%	87%

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	-	A
---	---	--------------------------------------	---	---

Dari Tabel 3.2.2 tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 bahkan ada yang telah mencapai target akhir Renstra. Namun secara umum, indikator kinerja masih dalam proses memenuhi target yang ditargetkan oleh Renstra sampai dengan target jangka menengah (tahun 2025). Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2025, khususnya sejumlah indikator kinerja yang telah mencapai target jangka menengah, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah yaitu tahun 2025 akan dapat dicapai. Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong perlu merumuskan program dan kegiatan- kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, selain kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator-indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

3.4 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja, dari lima indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja telah berhasil dicapai dengan baik, Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 telah dapat dicapai dengan baik

Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025
1	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	-	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	-	100%

1. Sasaran strategis I : “Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara”, dengan indikator kinerja Persentasi Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berpolitik (PEMILU) menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025
2	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	-	100%

2. Sasaran strategis II “Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial”, dengan indikator kinerja Persentase Konflik Sosial yang dapat diselesaikan di Kabupaten Tabalong , menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025
3	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)	-	100%

3. Sasaran strategis III “Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara“, dengan indikator kinerja Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang perekonomian yang direkomendasikan, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025
-----	-------------------	-------------------	--------------	--------------

4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	-
---	---	--------------------------------------	----	---

4. Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah” dengan Indikator Nilai AKIP yang menunjukkan semakin naik peningkatannya.

3.5 Kendala dan Hambatan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dapat dicapai dengan sangat baik. Namun demikian, upaya-upaya untuk pencapaian yang baik tersebut bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan yang dihadapi pada Tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian dari kendala dan hambatan tersebut telah dapat diatasi, namun beberapa kendala dan hambatan masih membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 antara lain adalah:

1. Jumlah peserta sosialisasi masih terbatas dan peserta selama ini hanya para pelajar SLTA/ sederajat, belum mencakup elemen masyarakat dan hanya dilakukan di Kabupaten/kota.
2. Kurangnya SDM yang ada dikepengurusan parpol dalam pembuatan SPJ terutama dalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, adanya pergantian kepengurusan dalam parpol, masih kurangnya jumlah bimtek yang dilakukan kepada parpol, terlambatnya laporan camat kepada badan Kesbangpol, kurangnya jumlah sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan, sehingga tidak semua elemen masyarakat dapat mengikutinya, kurangnya jumlah dana yang tersedia.
3. Masih kurangnya jumlah pertemuan dengan SKPD yang dilakukan 1 tahun, kemampuan SDM anggota LSM masih cukup rendah, masih kurangnya pembinaan terhadap ormas khususnya LSM, sulitnya melakukan pendataan keberadaan ormas untuk dijadikan data yang valid.

4. Kurangnya sosialisasi dan monitoring ke lapangan.
5. Tim dan forum-forum daerah yang di daerah menangani deteksi dini dan penanganan konflik belum bekerja maksimal. Pada kegiatan penanganan orang asing masih adanya data yang tidak sinkron antar instansi terkait.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinamika mewabahnya COVID-19 di Indonesia telah mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Tabalong. Sejumlah pengaruh positif dari kondisi ini juga diiringi dengan pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan dalam menciptakan kondusivitas daerah, serta tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam aspek sosial ekonomi masyarakat, dimana masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta semangat kebangsaan dan bela Negara yang mulai berkurang, peningkatan konflik sosial, dan maraknya faham-faham dan gerakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, seperti gerakan Ormas Islam serta kelompok-kelompok radikal lainnya.

Pada akhir tahun 2021, organisasi kemasyarakatan yang berskala besar, yaitu antara Front Pembela Islam (FPI) kedatangan Imam Besar, sejak kedatangan beliau gejolak mulai timbul terutama bagi para Non Muslim yang berdampak sampai ke daerah ormas ini termasuk ormas besar yang memiliki massa yang besar pula, sehingga perlu penanganan yang intensif serta telah menyita perhatian khalayak umum.

Selain itu maraknya kejadian terorisme di Indonesia, sehingga berbagai pihak selalu melakukan tindakan intelejen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah.

Dalam menghadapi kondisi ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dituntut untuk selalu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders*-nya dan intelegen negara dengan tetap mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu mencegah atau mereduksi potensi ancaman gangguan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain seperti :

- 1) Melaksanakan Pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara, dengan

sasaran kelompok masyarakat yang berpotensi menyebarkan pendidikan tersebut, sehingga bisa menimbulkan efek bola salju yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas. Kelompok sasaran seperti ini antara lain adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok PKK, Karang Taruna, Ketua RT/RW dan guru-guru.

- 2) Pemberdayaan *local wisdom* seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Budaya, dan Tokoh Agama serta komponen masyarakat lainnya dalam upaya mencegah atau mengurangi terjadinya konflik sosial.
- 3) Menanamkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki perbedaan paham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi

3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong memperoleh total anggaran sebesar Rp. 25.676.398.558,-. Anggaran tersebut terdiri :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.293.990.000,00 realisasi anggaran 4.311.781.970,00 atau dalam perentasi sebesar 81,45%,.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.222.811.817.00, realisasi anggaran Rp. 6.086.084.975 atau 74,01%.
3. Belanja Hibah sebesar Rp.11.380.640.000,00 realisasi anggaran Rp. 11.380.640.000,00 atau 100% Realisasi penggunaan anggaran tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.6.1

Tabel 3.6.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Tabalong

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.451.116.212,-	6.965.350.478,-	82.42%

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.647.524,-	152.252.300,-	90.82%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.322.070.000,-	4.339.861.970,-	81.54%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.421.828,-	24.772.700,-	78.84%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.232.787,-	918.592.195,-	88.14%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	465.745.906,-	380.868.130,-	81.78%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.677.316,-	607.844.827,-	69.49%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.320.851,-	541.158.356,-	98.87%
B.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.087.202.300,-	1.653.568.107,-	79.22%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.087.202.300,-	1.653.568.107,-	79.22%
C.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.721.680.430,-	1.680.330.110,-	97.60%

1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.721.680.430,-	1.680.330.110,-	97.60%
D.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.287.273.570,-	932.617.340,-	72.45%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.287.273.570,-	932.617.340,-	72.45%
E.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	672.482.534,-	463.099.850,-	68.86%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	672.482.534,-	463.099.850,-	68.86%
F.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.456.643.512,-	10.718.189.190,-	93.55%
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	11.456.643.512,-	10.718.189.190,-	93.55%
	Jumlah	25.676.398.558,-	22.413.155.075,-	87.29%

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara umum telah berhasil

menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam RKT tahun 2025. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun 2025 Selain itu, perkembangan politik dalam negeri selama tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026, dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong .

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. memunculkan sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan/ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan urusan pemerintahan yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi urusan Pemerintahan Umum yang kewenangannya berada pada Presiden dan akan dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan dibantu oleh instansi vertikal. Jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagai SKPD yang secara langsung berkaitan dengan perubahan ini dituntut untuk menyusun langkah- langkah antisipasi dan persiapan yang dinilai perlu untuk menghadapi perubahan tersebut. Koordinasi dan komunikasi, baik secara vertikal dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Kantor/Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, maupun secara horizontal dengan Setda Kabupaten Tabalong dan Biro Organisasi Setda Kabupaten Tabalong perlu dilakukan secara intensif.

Dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka perlu direncanakan dan dirumuskan

kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran. Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Demikian LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini disusun, untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Tanjung, 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong



Drs. ARBUANSYAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19730207 199311 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 89, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513,
Telp / Fax : (0526) 2021073, Email : kesbangpol.tabalong@gmail.com
Website : www.kesbangpol.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
pada tanggal : 13 Agustus 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tabalong,



DR. ARBUANSYAH, MA

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19730207 199311 1 003

Tembusan :

1. Bupati Tabalong
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

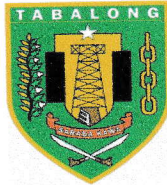
- Nama Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lainnya.
- Fungsi : a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
e. Pengelolaan urusan kesekretariatan.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara	Persentase pembinaan pendidikan berpolitik di daerah Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Dengan tingginya pembinaan pendidikan politik dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten tabalong semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi <i>Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan politik dan ormas tahun n di bagi target pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan politik dan ormas tahun n di kali 100%</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
2.	Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan EKOSOSBUD	Dengan meningkatnya intensitas pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran serta pemahaman masyarakat/pelajar tentang sosial budaya dan nilai-nilai bangsa, akan meningkatnya rasa nasionalisme dan ketahanan ekonomi sosial budaya di Kabupaten Tabalong <i>Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ekososbud di bagi target pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ekososbud dalam tahun n di kali 100%</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
3.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase pembinaan kewaspadaan nasional	Dengan meningkatnya kewaspadaan dini / deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta pertemuan forum oleh semua unsur komponen di daerah maka akan mengantisipasi terjadinya potensi konflik di Kabupaten Tabalong <i>Realisasi kegiatan peningkatan pencegahan dini dan deteksi dini potensi konflik tahun n di bagi target kegiatan peningkatan pencegahan dini dan deteksi dini potensi konflik tahun n di kali 100%</i>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Predikat nilai AKIP perangkat daerah	AKIP SKPD	Inspektorat

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARBUANSYAH, MA
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Ir. H. M. Noor Rifani, S.H., S.T., MT
Jabatan : Bupati Tabalong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung, Agustus 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI TABALONG,

Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TABALONG,

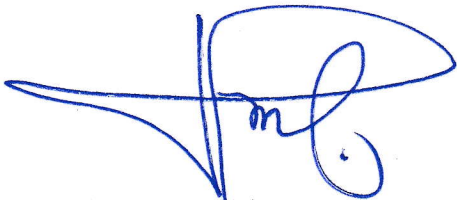
Drs. ARBUANSYAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP.19730207 199311 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesadaran Berpolitik Warga Negara	Persentase pembinaan pendidikan berpolitik di daerah	70%
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	70%
2.	Meningkatnya Rasa Nasionalisme di Masyarakat dan Warga Negara	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ekonomi, sosial budaya, agama	70%
3.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	Persentase pembinaan kewaspadaan nasional	75%
4.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	B

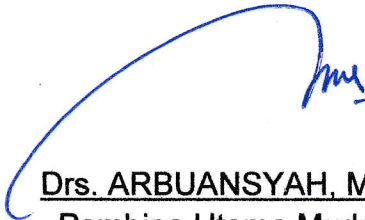
NO	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.451.116.212,-
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	2.087.202.300,-
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	1.721.680.430,-
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp.	1.287.273.570,-
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	672.482.534,-
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	11.456.643.512,-
Jumlah		Rp.	25.676.398.558,-

BUPATI TABALONG,



Ir. H. M. NOOR RIFANI, S.H., S.T., MT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG,



Drs. ARBUANSYAH, MA
Pembina Utama Muda
NIP.19730207 199311 1 003